

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM
TETAP OLEH KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana
Hukum*



Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

Antoni Putra, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

No. Reg : 04/PK-IV/II/2026

	No. Alumni Universitas	Syafri Nayla Rahayu	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 30 November 2004 b. Nama Orangtua : Syafriyanto, Martini. K. c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. No. BP : 2210111050	f. Tanggal Lulus : 29 Januari 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 5 Bulan i. IPK : 3,92 j. Alamat : Jalan Sijolang Dt P Basa Gang Gandaria Nomor 77 A, Bukittinggi	

PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI

(Syafri Nayla Rahayu, 2210111050, Fak. Hukum Universitas Andalas, 77 Hlm, 2026)

ABSTRAK

Narkotika merupakan masalah serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pada kasus narkotika setelah barang bukti ditetapkan sebagai benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan maka selanjutnya narkotika akan dirampas untuk dimusnahkan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari sejak putusan hukum memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi? 2. Bagaimana Kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Negeri Bukittinggi terlebih dahulu mengumpulkan barang bukti dalam jumlah cukup banyak sebelum dilakukan pemusnahan. Barang bukti dalam setiap perkara narkotika memiliki jumlah dan karakteristik berbeda, dalam rentang waktu seminggu belum dapat dipastikan bahwa barang bukti perkara narkotika yang memiliki kekuatan hukum tetap memiliki jumlah yang cukup banyak untuk dimusnahkan dan kondisi tersebut mengakibatkan pemusnahan tidak mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan batas waktu 7 hari paling lama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan melaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 2 kali dalam setahun. Hal ini dikarekan beberapa kendala yang dihadapi diantaranya yaitu anggaran untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang terbatas, tidak adanya standar jumlah barang bukti yang terkumpul ketika dilakukan pemusnahan sehingga apabila akan dilakukan pemusnahan maka akan dikumpulkan barang bukti hingga cukup banyak, lokasi pemusnahan yang tidak sesuai dengan standar, alat yang digunakan Kejaksaan Negeri Bukittinggi untuk melakukan pemusnahan narkotika jenis ganja yang kurang layak.

Kata Kunci: Pemusnahan Barang Bukti, Narkotika, Kejaksaan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 29 Januari 2026.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Efren Nova, S.H., M.H.	Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	Alumni University Number	Syafri Nayla Rahayu	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Bukittinggi / November 30 th 2004 b. Parents' Name : Syafriyanto, Martini. K. c. Faculty : Law d. Concentration : Criminal Law e. Student ID : 2210111050		f. Graduation Date : 29 th Jan 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length of Study : 3 years 5 months i. GPA : 3,92 j. Address : Jalan Sijolang Dt P Basa Gang Gandaria Nomor 77 A, Bukittinggi

EXECUTION OF THE DESTRUCTION OF EVIDENCE OF NARCOTICS CRIMES THAT HAVE BEEN LEGALLY FINALIZED BY THE BUKITTINGGI DISTRICT ATTORNEY OFFICE
(Syafri Nayla Rahayu, 2210111050, Faculty of Law, Andalas University, 77 Pages, 2026)

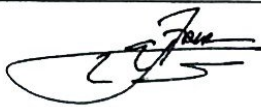
ABSTRACT

Narcotics are a serious problem faced by the Indonesian nation. In narcotics cases, after the evidence has been designated as seized objects that are prohibited from being distributed, the narcotics are subsequently confiscated to be destroyed by law enforcement officials. The implementation of the destruction of narcotics evidence by prosecutors is regulated in Government Regulation Number 40 of 2013 concerning the Implementation of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which states that the destruction of narcotics evidence by prosecutors shall be carried out within a maximum period of 7 days from the date the court decision obtains permanent legal force. The formulation of the problems in this study is as follows: 1. How is the implementation of the destruction of evidence of narcotics crimes that have obtained permanent legal force carried out by the Bukittinggi District Prosecutor's Office? 2. What are the obstacles in carrying out the destruction of evidence that has obtained permanent legal force by the Bukittinggi District Prosecutor's Office? This study uses an empirical juridical research method. The results of the study indicate that the implementation of the destruction of narcotics evidence that has obtained permanent legal force at the Bukittinggi District Prosecutor's Office is not in accordance with statutory regulations. The Bukittinggi District Prosecutor's Office first collects evidence in a sufficiently large quantity before destruction is carried out. Evidence in each narcotics case has different quantities and characteristics; within a one-week period, it cannot be ascertained that narcotics case evidence that has obtained permanent legal force has accumulated in a sufficient quantity to be destroyed, and this condition results in the destruction being impossible to be carried out in accordance with the maximum time limit of 7 days as stipulated in statutory regulations. The Prosecutor's Office carries out the destruction of evidence twice a year. This is due to several obstacles encountered, including limited budget for carrying out the destruction of evidence, the absence of a standard amount of evidence collected when destruction is carried out so that if destruction is to be conducted the evidence will be accumulated until it is sufficiently large in quantity, destruction locations that do not meet standards, and the equipment used by the Bukittinggi District Prosecutor's Office to destroy narcotics of the marijuana type that is inadequate.

Keywords: *Destruction of Evidence, Narcotics, Attorney General's Office*

This minor thesis has defended in front of the examiner team at January 29, 2026.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
Name	Efren Nova, S.H., M.H.	Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: